

Analisa Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tahun 2017-2020 Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

Adi Wilyanto¹ , Angelina Julia Renaldi ², Eni Valentina³ , Richmond⁴, Rieza Melinda⁵

2141073.adi@uib.edu¹ , 2141290.angelina@uib.edu² , 2141162.eni@uib.edu³ ,
2141285.richmond@uib.edu⁴ , 2141244.rieza@uib.edu⁵

Universitas Internasional Batam

Abstract

The relationship between the inflation rate and the unemployment rate affects a country's mix of fiscal and monetary policy decisions to achieve better economic conditions. The purpose of this study is to analyze the Medan City Government's policy regarding the threat of unemployment after the increase in inflation using data from 2017-2020. The data collection method used is library research method. In the results of the study, the number of unemployed from 2017 decreased by 9.46%, in 2019 it increased by 8.53 and in 2020 the increase reached 10.74%. In 2020, Indonesia was affected by the covid-19 pandemic which caused the country's economy to decline. This is one of the factors for the increasing number of unemployed and the inflation rate from 2017 has decreased until 2020. Inflation must be prevented immediately by means of policies from the government, namely by receiving and state budget expenditures to maintain currency stability with the aim of improving the welfare of the people in a country.

Keywords: Unemployment, Inflation, Medan

Abstrak

Hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran mempengaruhi bauran keputusan kebijakan fiskal dan moneter suatu negara untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Medan terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi dengan menggunakan data tahun 2017-2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Dalam hasil kajian jumlah pengangguran dari tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9,46%, tahun 2019 meningkat sebesar 8,53% dan tahun 2020 peningkatan mencapai 10,74%. Pada tahun 2020, Indonesia terkena dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian negara menurun. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat inflasi dari tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2020. Inflasi harus segera dicegah melalui kebijakan dari pemerintah yaitu penerimaan dan pengeluaran APBN untuk menjaga stabilitas mata uang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

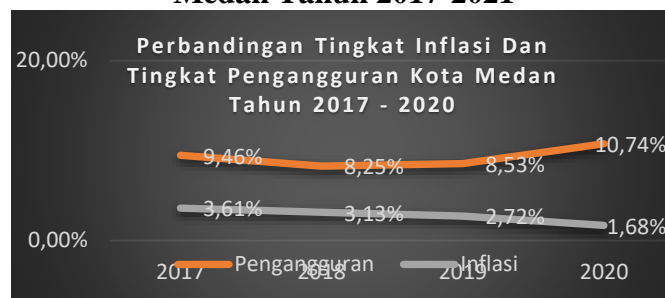
Kata Kunci : Pengangguran, Inflasi, Medan

Pendahuluan

Inflasi dan pengangguran adalah dua ukuran kinerja ekonomi suatu negara. Hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran mempengaruhi campuran keputusan kebijakan fiskal dan moneter suatu negara untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat indonesia hingga saat ini adalah pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan akibat dari beberapa faktor sehingga tidak mendapatkan pekerjaan atau yang mengharuskan kehilangan pekerjaan. Masalah pengangguran tidak hanya dihadapi oleh negara

berkembang saja, namun juga pada negara-negara yang telah maju. Mengutip Data Badan Pusat Statistik Indonesia Pada Bulan Februari 2020, jumlah pengangguran tertinggi berada pada rentang usia 15 hingga 29 tahun. Tingkat pengangguran dari tahun 2017 yang berjumlah 157.531 orang mengalami penurunan sebesar 9,46% menjadi 138.788 orang. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 8,53% menjadi 144.936 orang dan berlangsung hingga tahun 2020 kenaikan mencapai 10,74%. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara terus menerus pada suatu waktu tertentu. Jika tingkat inflasi berada di sekitar 1-3% masih dianggap wajar dan menunjukkan bahwa perekonomian negara yang sehat. Mengutip Data Badan Pusat Statistik Indonesia Tingkat Inflasi pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2020 atau bisa disebut juga dengan deflasi kebalikan dari inflasi. Deflasi ialah suatu kondisi penurunan harga barang atau jasa pada suatu waktu tertentu. Deflasi ini menyebabkan pengangguran di kota Medan bertambah. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengambilan kebijakan pemerintah Kota Medan dalam hal menjawab ancaman kenaikan tingkat pengangguran pasca naiknya tingkat inflasi dengan menggunakan data selama waktu rentang 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2017-2020.

Gambar 1. Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Inflasi Kota Medan Tahun 2017-2021



Sumber: BPS, 2021

Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah salah satu dari banyak cabang ilmu ekonomi. Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan kebijakan ekonomi secara umum yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Seperti; Pendapatan nasional, produksi nasional dan investasi nasional, neraca perdagangan negara, kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat bunga dan tingkat utang pemerintah. Agen ekonomi terdiri dari Konsumen, Produsen, Pemerintah dan Swasta (Negara – negara lain). Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro berfokus pada interaksi antara tenaga kerja, pergerakan barang dan aset ekonomi yang merupakan penggerak aktivitas komersial di setiap individu atau negara. Situasi makro ekonomi suatu negara kondisinya sangat mempengaruhi kinerja perusahaan di negara tersebut.

2.2 Inflasi

Secara umum, inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan yang terjadi secara terus menerus selama periode waktu tertentu. Kenaikan harga komoditas

yang kecil (hanya satu dua barang) tidak termasuk dalam kategori inflasi, karena tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan harga pada komoditas lain.

Inflasi diketahui sebagai dampak yang besar bagi negara berkembang. Negara berkembang yang mengalami inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti defisit anggaran pemerintah, yang meningkatkan jumlah uang beredar. Terdapat faktor lain yang dinyatakan dalam buku “Kebanksentralan” seri inflasi (Suseno dan Siti Astiyah, 2009:11-17) yaitu :

a. Inflasi oleh faktor permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Terjadinya inflasi karena permintaan disebabkan oleh kenaikan jangka pendek dalam jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar menurunkan bunga dan meningkatkan konsumsi dan investasi secara keseluruhan. Ketika permintaan meningkat, harga total secara otomatis meningkat. Peristiwa ini disebut inflasi permintaan atau demand so-inflation.

b. Inflasi Sisi Penawaran (*Cost push inflation/ supply shock inflation*)

Inflasi penawaran adalah inflasi yang menyebabkan naiknya harga komoditas yang dikendalikan pemerintah seperti komoditas yang harus diimpor dan harga barang yang dikendalikan pemerintah, seperti kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga minyak tanah (BBM), kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

c. Inflasi Campuran (*Mixed Inflation*)

Inflasi campuran ialah gabungan dari 2 jenis inflasi diatas yaitu dari faktor permintaan dan faktor penawaran, perilaku penawaran dan permintaan ketidakseimbangan, atau peningkatan permintaan barang dan jasa meningkat. Akibatnya, faktor produksi berkurang dan persediaan berkurang. Sedangkan barang pengganti atau alternatif yang terbatas atau tidak ada menyebabkan kenaikan harga.

d. Inflasi Ekspektasi (*Expected Inflation*)

Inflasi bukan hanya didorong oleh faktor penawaran dan permintaan, tetapi juga didorong oleh ekspektasi agen, terkadang disebut sebagai ekspektasi inflasi (Gordon, 2007:15). Inflasi yang diharapkan adalah tingkat inflasi yang akan terjadi sebagai akibat dari perilaku adaptif atau agresif masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, pemerintah kota berasumsi bahwa situasi ekonomi akan lebih baik di masa depan daripada di masa lalu. Ekspektasi publik dapat menyebabkan inflasi tarikan permintaan dan inflasi tarikan biaya, tergantung pada ekspektasi masyarakat dan keadaan pasokan barang.

Inflasi terjadi karena adanya faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor penawaran dapat terjadi melalui produksi yang lebih rendah dibanding biaya produksi yang lebih tinggi karena inefisiensi perusahaan, penurunan nilai tukar, kenaikan harga komoditas, permintaan upah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor permintaan disebabkan oleh permintaan masyarakat yang meningkat terlalu banyak atau terlalu cepat relatif terhadap penawaran output agrerat

Pada dasarnya terjadinya inflasi tidak selalu berdampak negatif terhadap perekonomian. Apalagi saat inflasi terjadi di bawah 10%, inflasi dianggap rendah dan justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, karena harga yang lebih tinggi menyebabkan keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan produksi memiliki efek positif lainnya. Artinya, tingkat pengangguran lebih rendah karena tersedianya lapangan kerja baru.

2.3 Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian pengangguran dalam indeks ketenagakerjaan adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang menacri pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru atau dapat didefinisikan juga sebagai penduduk yang tidak sedang mencari pekerjaan karena sudah mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja. Umumnya, pengangguran juga dapat dianggap sebagai seseorang orang yang dalam suatu keadaan sudah

masuk ke kategori angkatan kerja (*labe force*) tetapi menganggur dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengukuran tingkat pengangguran suatu wilayah atau regional dapat dilakukan dengan dua cara:

a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Tingkat pengangguran dapat dihitung sebagai persentase dengan menghubungkan jumlah orang yang menganggur dengan jumlah total orang yang bekerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

- 1) Pegawai tetap (*employed*) adalah seseorang yang bekerja penuh waktu atau yang minggu kerjanya mencapai 35 jam.
- 2) Setengah Pengangguran adalah seseorang yang bekerja tetapi kurang dimanfaatkan atau bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dijelaskan oleh hukum Okun yang dinamai ekonom Arthur Okun yang pertama kali mempelajari tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurut penelitiannya, peningkatan tingkat pengangguran suatu negara meningkatkan GDP (*Gross Domestic Profit*) nya juga akan mengalami kenaikan sebesar 2%. Pengangguran juga berkaitan dengan ketidakmampuan untuk bekerja, dan lapangan pekerjaan berhubungan dengan investasi yang dihasilkan dari akumulasi tabungan. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan semakin rendah kemungkinan lapangan pekerjaan baru karena tidak ada kemungkinan menciptakan kapasitas produksi yang baru.

Metodologi Penelitian

3.1 Definisi Operasional

1. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sama sekali atau masih dalam masa pencarian pekerjaan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa tingkat pengangguran pasca inflasi yang terjadi dalam bentuk persentase di kota Medan selama tahun 2017-2020.
2. Diketahui bahwa jika suatu harga barang atau jasa mengalami kenaikan secara terus disebut sebagai inflasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data inflasi atau deflasi negara Indonesia selama tahun 2017-2020. Serta menjelaskan pengangguran yang terjadi karena dampak dari inflasi atau deflasi ini.

3.2 Jenis Penelitian

Pada tahap ini, kami menganalisis kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi, mengenal lebih dalam penyebab terjadinya inflasi dan pengangguran serta mengobservasi definisi operasional tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari pengangguran pasca kenaikan inflasi saat ini.

3.3 Sumber Data

Peneliti mengumpulkan data dari sumber data sekunder. Dimana data sekunder ini ialah data yang telah ada pada obyek penelitian atau data hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, data tersebut bersumber dari dokumen organisasi tersebut atau institusi lainnya, yang dianggap berkaitan atau relevan dengan masalah yang di bahas. Data ini penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Medan, Jurnal yang terkait, *Website Sensus*

Analisa Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tahun 2017-2020 Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

Penduduk, *Website* yang relevan, sumber-sumber penelitian referensi dan hal-hal lain yang mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Selanjutnya terdapat metode pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam tahap ini, penulis juga menggabungkan semua data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang terkumpul yaitu inflasi dan jumlah pengangguran di kota Medan dari tahun 2017-2020.

3.5 Tahap Analisa Data

Dari data dan permasalahan yang kami telah kumpulkan, “Kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi”. Tingkat inflasi lumayan rendah di berbagai permasalahan yang dihadapi. Tahap ini penulis akan menganalisa dan mendeskripsikan lebih rinci serta detail data yang telah dikumpulkan dari jurnal dan media. Berdasarkan data yang sudah didapatkan oleh penulis, dibuatlah tabel rincian yang berisi jumlah penduduk, persentase pengangguran, jumlah pengangguran dan tingkat inflasi di Kota Medan.

Hasil dan Pembahasan

Dari tabel di bawah menunjukkan persentase tingkat pengangguran di Kota Medan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Untuk tahun 2021 penulis telah mencari di website sensus penduduk dan beberapa pencarian lainnya tetapi tidak menemukan data khusus tahun 2021 sehingga kami hanya menganalisa tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terakhir.

Tabel 1. Tingkat pengangguran dan inflasi Kota Medan

Tahun	Jumlah Penduduk TPT	Persentase Pengangguran	Jumlah Pengangguran	Inflasi
2017	1.665.234	9,46%	157.531	3,61
2018	1.682.273	8,25%	138.788	3,13
2019	1.699.130	8,53%	144.936	2,72
2020	1.849.332	10,74%	198.618	1,68

Sumber: BPS, 2021

Tabel ini diukur dari data tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengangguran dari tahun 2017 yang berjumlah 157.531 orang mengalami penurunan sebesar 9,46% menjadi 138.788 orang. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 8,53% menjadi 144.936 orang dan berlangsung hingga tahun 2020 kenaikan mencapai 10,74% yaitu sejumlah 198.618 orang. Pada tahun 2020 ini, Indonesia juga terdampak pandemi covid-19 yang meningkat drastis dan perekonomian negara mengalami penurunan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pengangguran.

Diketahui bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa pada suatu waktu tertentu secara terus menerus. Jika tingkat inflasi berada di sekitar 1-3% masih dianggap wajar dan

menunjukkan bahwa perekonomian negara yang sehat. Dapat dilihat dari tabel bahwa tingkat inflasi dari tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2020 atau bisa disebut juga dengan deflasi kebalikan dari inflasi. Deflasi ialah suatu kondisi penurunan harga barang atau jasa pada suatu waktu tertentu. Deflasi ini menyebabkan pengangguran di kota Medan bertambah. Harga barang dan jasa yang menurun menyebabkan perusahaan-perusahaan rugi atau penurunan omset sehingga demi mempertahankan operasionalnya, banyak perusahaan yang melakukan tindakan membatasi tenaga kerja dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada tenaga kerja yang dianggap berlebihan atau tidak perlu. Karena pandemi covid-19 ini, sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021 tingkat inflasi masih berada di sekitar 1% yang menunjukkan perekonomian negara Indonesia tidak membaik. Di awal tahun 2022, Indonesia mulai membangkit kembali perekonomiannya, daya beli masyarakat meningkat sehingga tingkat inflasi mengalami kenaikan menjadi 4,48%.

Inflasi akan mengurangi pendapatan riil orang-orang dengan pendapatan tetap. Secara umum, upah tidak naik secepat harga, sehingga inflasi akan mengurangi upah riil bagi orang-orang dengan pendapatan tetap. Inflasi yang terjadi harus segera dicegah dengan cara kebijakan dari pemerintah yaitu:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ialah kebijakan dari pemerintah yang secara tidak langsung berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran negara. Contoh kebijakan fiskal ini adalah meningkatkan tarif pajak, membatasi pengeluaran pemerintah, dan meningkatkan nominal kredit. Tetapi, tidak semua masyarakat akan menerima adanya kenaikan pajak.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ini dari bank sentral untuk menjaga kestabilan mata uang yang dapat dijalankan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuannya menjaga stabilitas perekonomian negara, mengendalikan inflasi, menjaga harga barang di pasar agar tidak mengalami penurunan atau peningkatan yang berlebihan dan lain sebagainya.

3. Kebijakan Non-fiskal dan Non-Moneter

Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Terdapat 5 cara kebijakan nonfiskal dan nonmoneter yang biasa dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi, antara lain:

- a) Meningkatkan hasil produksi. Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, perputaran uang akan lebih cepat dan lebih banyak, sehingga jumlah uang beredar kembali seimbang.
- b) Meningkatkan masuknya barang impor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, barang harus didatangkan dari luar negeri. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi pajak dan mempermudah memperoleh lisensi untuk barang-barang impor.
- c) Menjaga kestabilan penghasilan masyarakat. Setiap orang tentu memiliki penghasilan atau pendapatan yang berbeda, sehingga mencegah pertumbuhan pendapatan juga merupakan cara untuk menekan inflasi yang tidak terkendali.
- d) Mengawasi harga barang. Ketika inflasi terjadi, tentunya harga barang cenderung naik tidak terkendali. Hal ini mengurangi daya beli masyarakat. Pemerintah berharap daya beli masyarakat lebih baik dengan menetapkan harga maksimal.
- e) Pengawasan peredaran barang. Pembatasan distribusi juga menjadi faktor kenaikan harga di wilayah tersebut. Permintaan yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah produk yang

terbatas karena keterlambatan pengiriman produk. Dengan menggunakan regulasi sebagai cara untuk mencegah inflasi, diharapkan barang akan cepat terdistribusi ke masyarakat.

Kesimpulan

Kenaikkan tingkat harga barang dan jasa secara menyeluruh dan terjadi terus-menerus yang disebut sebagai inflasi berpengaruh besar dengan perekonomian dan keberlangsungan negara. Pada tabel yang telah penulis sediakan, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di kota Medan mengalami peningkatan dan penurunan selama tahun 2017 hingga tahun 2020. Tahun 2020 dimana masa negara Indonesia mengalami pandemi *covid-19* yang membuat kasus penyakit tersebut meningkat drastis dan perekonomian negara mengalami penurunan dan tentunya karena berkurangnya lapangan kerja atau profit perusahaan-perusahaan menurun menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran bahwa bertambahnya satu pengangguran pada suatu negara maka GDP-nya juga akan mengalami kenaikan sebesar 2 persen. Deflasi terjadi jika suatu penurunan harga barang dan jasa yang menurun dapat menyebabkan perusahaan mengalami rugi atau penurunan omset. Sepanjang tahun 2020-2021 tingkat inflasi masih berada disekitar 1% yang memberikan hasil ekonomi Indonesia tidak membaik. Tingkat inflasi di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,48%, dan inflasi akan mengurangi pendapatan riil orang-orang dengan pendapatan tetap.

Daftar Pustaka

- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014). Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran (Kurva Phillips) di Indonesia. *APBN Induk*, 23–31.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>
- Manopo, F. R. (2017). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Pendekatan Model Koreksi Kesalahan. *Journal of Economic*, 53(9), 1–13.
- Salim, A., & Fadilla. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28. www.bps.go.id,
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Tul Ramadani, A., Junaidi, & Eliza, Z. (2021). Pengaruh pertumbuhan UMKM, inflasi, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*, 5(2), 153–173. <https://doi.org/10.32505/jii.v5i2.2392>